

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	7
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Koran Tempo	Wawasan
Tribun Jateng	Sindo	Republika	Kompas	

Halaman 18

BPK Didorong Lebih Kritis

PUDAKPAYUNG - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jateng akan melibatkan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam memeriksa laporan keuangan seluruh entitas Pemerintah Kabupaten/ Kota. Uji coba pemeriksaan melibatkan KAP telah dilakukan tahun lalu di Banyumas, Jepara dan Boyolali.

Kepala BPK Jateng, Hery Subowo mengatakan, mulai April mendatang, KAP resmi dilibatkan audit. Namun dari 36 entitas tidak semua diperiksa KAP. KAP baru akan memeriksa Pemkab Purworejo sedangkan yang lain masih diperiksa oleh BPK sendiri.

"Itu didasarkan UU No.12 / 2004, bahwa BPK dapat menggunakan pemeriksa di luar BPK untuk dan atas nama BPK. Salah satunya KAP. Di Jateng, kami baru pemeriksaan pendahuluan. Terincinya di Purworejo akan diperiksa KAP mulai awal April. BPK tetap masuk dalam struktur dalam tim sebagai ketua dan penanggungjawab. BPK tetap masuk dalam kombinasi," kata Hery Subowo kepada *Wawasan* usai audiensi dengan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di kantornya, Jumat (24/2).

Lembaga pemeriksa publik, KAP rencananya akan mengaudit keuangan pemerintah. Dengan demikian tidak semua auditor BPK diterjunkan untuk melakukan pemeriksaan keuangan rutin.

Tak dijelaskan kriteria, jumlah KAP yang akan dilibatkan.

Sementara dalam audiensi BAP dengan BPK turut mendampingi Kepala Inspektorat Jateng, Kunto Nugroho. Ketua BAP, Abdul Gafar Usman mengatakan, salah satu kewenangannya, menindaklanjuti hasil temuan BPK yang terindikasi kerugian negara. Pialhaknya berharap, adanya komunikasi BPK dengan dengan DPD selaku wakil daerah di pusat.

"Jika ada persoalan yang perlu dikonsultasikan, akan ditindaklanjuti. Kelemahan kita kurang komunikasi. Harusnya sesuai aturan, kebijakan dan kebijaksanaan," kata anggota DPD dari Kepulauan Riau itu didampingi delapan anggota BAP.

Bambang Sadono, anggota DPD dari Jateng mengaku khawatir pemeriksaan BPK hanya formalitas. Pihaknya berharap

BPK lebih kritis dalam pemeriksaan. "Formal adminitrasi sementara substansi tidak dilakukan. Apakah BPK tidak bisa mengoreksi alokasi Pemda yang dinilai berlebihan. Dulu (penganggaran entitas) ada supervisi BPK dengan KPK. Artinya sebelum terjadi kesalahan dan dalam pembagian alokasi," kata mantan anggota DPRD Jateng itu.

Substansi

Menanggapi itu, Hery yang menjabat sejak Februari 2015 itu mengakui, pihaknya hanya bertugas secara administratif terkait pembelian, bukti kas dan pertanggungjawaban. "Tapi mulai 2016 sampai 2020 BPK punya renstra, di antaranya RPJM dan RPJMP," katanya.

Kedepan, kata Hery, pihaknya akan mengarah substansi masalah dan meninggalkan administratif. Akan berangsur-angsur mening-

galkan pemeriksaan keuangan. "Nantinya akan beralih ke KAP. Daerah kecil akan dimulai. Sementara BPK ke pemeriksaan kinerja," ungkapnya.

Saat ini, imbuh Hery, pihaknya terus menggalang sinergi dengan berbagai pihak. Menurutnya, atas hasil auditnya dan belum direview Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP).

"Fungsi review APIP (inspektorat) belum maksimal. Makanya kami undang dan beri pengetahuan. Bulan depan kami juga akan undang APH. Menyamakan persepsi terkait kerugian negara," ujar dia.

Dijelaskan, saat ini pihaknya memiliki 130 pemeriksa dengan 36 entitas. Menurutnya, idealnya jumlah pemeriksa 154 orang. BPK Jateng terdiri empat Sub Auditorat membidangi 36 entitas dan terbagi dalam Jateng satu sampai empat. ■ *rdi-rth*



AUDIENSI : (dari kanan) Kunto Nugroho, Abdul Gafar Usman, Hery Subowo dan Bambang Sadono saat audiensi bersama di kantor BPK Perwakilan Jateng. ■ Foto : Sunardi - rth